

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN UMROH OLEH BIRO UMROH PT. SURYA CITRA MADANI

Oleh:
Awwis Al Qarni
13421044

Peningkatan jumlah Jamaah umroh di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan dari Biro Umroh. Beberapa Biro Umroh mengalami beberapa masalah diantaranya pemasaran umroh menggunakan istilah "Wisata Religi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan umroh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui bentuk Pertanggung jawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Umroh oleh Biro Umroh PT. Surya Citra Madani.

Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan bentuk penyajian datanya adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis baik dari segi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Lokasi penelitian di PT Surya Citra Madani dengan Narasumber yang bekerja sebagai Front Office di PT Surya Citra Madani Yogyakarta. Teknik Penentuan informan melalui Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Keabsahan data yang dipilih adalah Triangulasi Waktu. Teknik Analisis Data dengan metode deskriptif-kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini ialah: 1) Penyelenggaraan umroh menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, Surat Muassasah Muthawwid Jamaah Haji Asia Tenggara. 2) Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh oleh Biro Umroh PT. Surya Citra Madani bahwa secara hukum positif telah memenuhi ket�atan terhadap hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, namun secara hukum syariah masih belum menaati sepenuhnya Surat Muassasah Mutthawwid Jamaah Haji Asia Tennggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia jo. Surat Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi tentang Larangan istilah wisata religi. Secara eksplisit penulis masih menemukan jadwal ke tempat wisata yang tidak ada hubungan dengan rukun umroh dan penyalahgunaan lokasi ibadah sebagai lokasi wisata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Ibadah, Umroh

ABSTRACT

Law-Accountability in the Implementation of Umroh by the Umroh Bureau

of PT. Surya Citra Madani

by: Awwis Al Qarni

134210144

ISLAM

Increasing the number of admiral witter in Indonesia is often not in line with the improvement of service from the Umroh Bureau. Some Umroh Bureau experienced some problems including marketing Umroh using the term "religious tour". The purpose of this study is to know the settings of Umroh implementation according to applicable laws and regard to know the form of legal accountability in the implementation of Umroh by the Bureau of Umroh PT. Surya Citra Madani. The type of research is empirical research with the form of presentation of data is qualitative. The approach used by the author is a juridical approach both in terms of positive law in the form of legislation and Islamic law based on the Qur'an and Al-Hadiths. The location of the study at PT Surya Citra Madani with the Resources who worked as the front office at PT Surya Citra Madani Yogyakarta. Technique of determining informants through purposive sampling. Data collection techniques through interviews and library studies. The valuable data valuation is the time triangulation. Technique of data analysis with descriptive-qualitative method. The conclusion of this study is: 1) Implementation of Umroh according to legislation in Indonesia based on Law Number 13 Year 2008 on the implementation of Haji, Work Regulation No. 79 of 2012 on the implementation of Law Number 13 Year 2008 on the Implementation of Hajj, Religious Minister of the Republic of Indonesia Number 8 of 2018 on the Organization of Umbroad Worship, Surat Muassahah Muthawwif Jamaah Haji Asia Southeast Asia. 2) The legal account of the law in the implementation of Umroh worship by the Bureau of Umroh PT. Surya Citadi Cadra's civilian that has been legally legitimately meets the obedience of civil law, criminal law and administrative law, as stated in the Regulation of the Minister of Religious Republic of Indonesia Number 8 of 2018 on the implementation of Umbroad Worship Traffic, but legally Shariah has not been observing the entire Muassasah Mutthawwif Jamaah Haji Asia Tennggara to the Chairman of the Office of Hajji Indonesia's Journey. Letter of Deputy Minister of Hajji and Saudi Umrah on the ban on the religion of the religious tourism. Explicitly the author still finds a schedule to tourist attractions that are not relation to the Rhukun Umroh and abuse of the wicker location as a tourist location.

Keywords: legal accountability, worship, umroh